

**PEMBARUAN HUKUM PEMILU MELALUI PEMBENTUKAN
PERADILAN PEMILU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana

Martinus Nusa Labdagati

NIM: 312013092



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

SEPTEMBER 2017



PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martinus Muser Labdayati
NIM : 312013 092 Email : musalabdayati@yahoo.com
Fakultas : Hukum Program Studi : IBMU Hukum
Judul tugas akhir : Pembinaan Hukum Pemilya mengenai pembentukan
Peradilan Pemilya
Pembimbing : 1. R.E.S. Fobra, SH., MBS
2. -

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kepariphatan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

Salatiga, 5 September 2017



Tanda tangan & nama terang mahasiswa
Martinus Muser Labdayati



PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marthius Nusa Labdayati
NIM : 312013092 Email : musalabdayati@yahoo.com
Fakultas : Hukum Program Studi : ILMU HUKUM
Judul tugas akhir : Pembinaan Hukum Pemilih melalui pembentukan Paradiklon
Pemilih

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif** kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

- ☒ a. Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- ☐ b. Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA**

* Hak yang tidak terbatas hanya bagi satu pihak saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak non-eksklusif kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak copyright atas karya tersebut.

** Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan/ alasan tertulis dari pembimbing TA dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dekan/kaprodi).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 5 September 2017

Mengetahui,

R.E.S. FOBIA-SH, MIDS.

Tanda tangan & nama terang pembimbing I

Marthius Nusa Labdayati

Tanda tangan & nama terang mahasiswa

Tanda tangan & nama terang pembimbing II

Lembar Persetujuan

**PEMBARUAN HUKUM PEMILU MELALUI PEMBENTUKAN
PERADILAN PEMILU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana

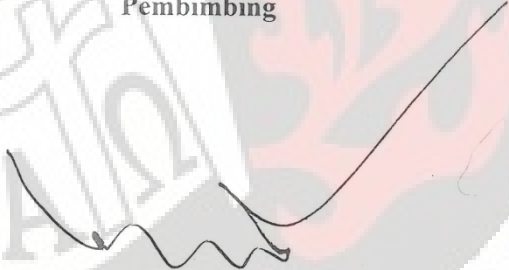
Oleh :

Martinus Nusa Labdagati

NIM: 312013092

Disetujui Oleh :

Pembimbing



R.E.S. Fobia, SH., MIDS

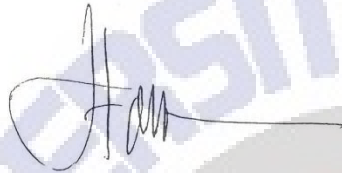
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

SEPTEMBER 2017

Lembar Pengujian

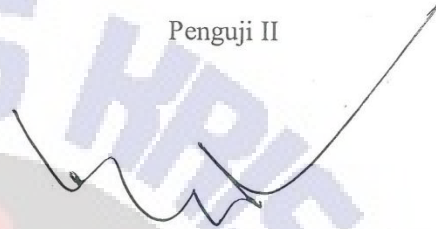
Komisi Penguji

Penguji I



Kustadi, S.H., M.Hum

Penguji II



R.E.S. Fobia, SH., MIDS

Penguji III



Dr. Jumiarti, SH., M.Hum.,

Diuji pada tanggal 5 September 2017

Mengesahkan,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Christina Maya Indah, SH., M.Hum

KATA PENGANTAR

Penelitian hukum diawali dengan adanya permasalahan hukum di masyarakat. Melalui penelitian hukum masalah tersebut dapat dipecahkan melalui kajian-kajian hukum yang mendalam. Penelitian hukum juga dapat memberi gagasan baru dalam perkembangan ilmu hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di masa mendatang. Dalam hal ini penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis dituangkan dalam suatu karya ilmiah yang dijadikan dalam bentuk skripsi. Penulisan skripsi yang berjudul **“Pembaruan Hukum Pemilu Melalui Pembentukan Peradilan Pemilu”** merupakan suatu bentuk karya ilmiah yang dilakukan penulis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

Penelitian dan penulisan skripsi ini bertujuan memberi pandangan masa mendatang mengenai hukum pemilu di Indonesia. Hukum Pemilu yang masuk dalam rumpun Hukum Tata Negara senantiasa selalu berkembang oleh karena itu mengingat akan kebutuhan perkembangan tersebut maka hukum pemilu harus senantiasa mengikutinya. Salah satu cara penyesuaian dalam mengikuti perkembangan jaman adalah diperbarui. Dengan hukum pemilu yang diperbarui lewat badan peradilan khusus pemilu maka masa mendatang hukum pemilu menjadi semakin ideal guna kepentingan luas masyarakat Indonesia

Pada penelitian dan penulisan skripsi ini terbagi menjadi beberapa pokok bahasan yakni:

BAB I – Pendahuluan

Pada Bab ini penulis akan memaparkan secara umum mengenai permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini.

BAB II – Kajian Teori dan Analisis

Pada bab dua ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan pustaka, hasil penelitian, dan analisis, yang didalamnya terdiri atas pembaruan hukum pemilu, alasan-alasan (filosofis, sosiologis, dan yuridis) mengapa diperlukan adanya badan peradilan pemilu, badan peradilan pemilu masa mendatang, dan peluang adanya kehadiran peradilan pemilu di Indonesia.

BAB III – Penutup

Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari seluruh pihak. Semoga tulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di masa mendatang, khususnya dibidang Hukum Pemilu

Salatiga 5 September 2017

Martinus Nusa Labdagati

PEMBARUAN HUKUM PEMILU MELALUI PEMBENTUKAN

PERADILAN PEMILU

M. NUSA LABDAGATI

Abstrak

Pemilu adalah bagian penting dalam sistem demokrasi. Pemilu yang diselenggarakan rutin untuk proses pergantian rezim atau penguasa baik dalam eksekutif atau legislatif. Di dalam proses pemilu pada akhirnya berakhir sering terjadi sengketa pemilu. Sengketa yang terjadi menghambat proses pemilu dan menghambat juga sistem demokrasi yang berdampak luas. Kewenangan menangani sengketa hasil pemilu yang selama ini dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi pada faktanya tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan fungsi Mahkamah Konstitusi pada hakekatnya. Peradilan khusus pemilu memberikan ruang atau tempat bagi berbagai pihak untuk mencari keadilan dan Hak Asasi Manusia terkait dengan pemilu yang terjadi. Dengan adanya peradilan pemilu maka jaminan akan sistem pemilu yang ideal akan tercapai dan merupakan suatu gerakan pembaruan hukum yang menjadi kebutuhan di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Kata Kunci: Pembaruan hukum, peradilan pemilu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGUJIAN	iii
LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Metode Penelitian.....	14
BAB II PEMBAHASAN.....	17
A. Pembaruan Hukum Pemilu.....	20
B. Perlindungan Hak Asasi Manusia (Hak Pilih)	33
C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terkait Sengketa Pemilu	41
D. Peluang dan Peradilan Pemilu Masa Mendatang	52
BAB III PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63

B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

